

Analisis Kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Memenuhi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu 2024

Andika Nugraha Ramadhan¹, Sahruddin Lubis²

Universitas Nasional^{1,2}

Email: sahruddin.lubis@civitas.unas.ac.id



INFO ARTIKEL

Research Article

Kata Kunci: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ambang Batas Parlemen, Strategi Politik, Konflik Internal, Komunikasi Politik

Article History

Dikirim : 20 April 2025

Diterima: 06 Juni 2025

Dipublikasi: 24 Agustus 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis penyebab kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mencapai ambang batas parlemen pada pemilu legislatif 2024, yang mengakibatkan PPP tidak dapat mengirimkan wakil ke DPR RI. Kegagalan ini menjadi titik balik signifikan bagi PPP, mengingat partai ini telah lama menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan di Indonesia sejak didirikan pada 5 Januari 1973 sebagai hasil fusi dari empat partai Islam: Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus ini menemukan bahwa penyebab kegagalan PPP dalam mencapai ambang batas parlemen adalah karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti konflik kepemimpinan dan kurangnya konsolidasi. Faktor eksternal seperti persaingan dengan partai Islam lain dan perubahan preferensi pemilih. Penelitian ini merekomendasikan reformasi strategi komunikasi politik dan peningkatan konsolidasi internal untuk mengembalikan kepercayaan pemilih.

ABSTRACT

This research analyzes the causes of the United Development Party's (PPP) failure to reach the parliamentary threshold in the 2024 legislative elections, which resulted in the PPP being unable to send representatives to the House of Representatives (DPR RI). This failure is a significant turning point for the PPP, given that the party has long been one of the political forces to be reckoned with in Indonesia since its establishment on January 5, 1973 as a result of the fusion of four Islamic parties: Nahdlatul Ulama (NU) Party, Indonesian Muslimin Party (Parmusi), Indonesian Islamic Union Party (PSII), and Perti Islamic Party. The research found that the causes of PPP's failure to reach the parliamentary threshold were internal and external factors. Internal factors such as leadership conflicts and lack of consolidation. External factors such as competition with other Islamic parties and changes in voter preferences. The research recommends reforming political communication strategies and increasing internal consolidation to restore voter confidence.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) menandai fase penting dalam perjalanan demokrasi elektoral Indonesia. Sebagai ajang lima tahunan untuk menentukan arah kepemimpinan dan representasi politik nasional, Pemilu tidak hanya merefleksikan dinamika kekuatan partai-partai politik, tetapi juga mencerminkan perubahan aspirasi masyarakat terhadap sistem politik yang sedang berlangsung. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki otoritas politik baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik harus memperoleh minimal 4% suara sah nasional agar dapat masuk ke parlemen. Hal ini dapat disebut dengan istilah ambang batas parlemen atau *Parliamentary threshold*, yaitu batas minimum perolehan suara yang harus dicapai oleh partai politik dalam pemilihan umum agar suaranya diperhitungkan dalam penentuan perolehan kursi di parlemen. Ambang batas parlemen diperlukan untuk menciptakan persaingan sehat, mempercepat pembentukan pemerintahan, dan menyatukan partai politik secara nasional maupun lokal.

Dari hasil Pemilu 2024, salah satu sorotan utama yang dapat dicermati lebih jauh adalah kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam melewati ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang menyebabkan hilangnya kursi partai di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk pertama kalinya sejak tahun 1973. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP hanya memperoleh 3,87% suara nasional (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Padahal pada Pemilu 2019, PPP masih mampu memperoleh 4,52% suara dan mendapatkan 19 kursi DPR (Prasetyo, 2024).

Dalam perspektif demokrasi, partai politik merupakan pilar utama yang mewakili kepentingan masyarakat dan pemerintah (Watoni & Puspitarini, 2022). Selain itu, partai politik juga memiliki fungsi sebagai entitas yang menyalurkan kepentingan masyarakat serta memfasilitasi komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat (Rosana, 2012). Oleh karena itu, partai politik idealnya aktif dalam kehidupan sosial masyarakat sebelum pemilu melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi partai,

advokasi kebijakan, serta keterlibatan dalam isu-isu yang menjadi perhatian publik. Dalam konteks ini, partisipasi politik yang lebih terbuka dan berkelanjutan menjadi kunci bagi keberlanjutan eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi yang sehat (Pasaribu, 2017).

Di era digital yang sangat terhubung seperti saat ini, persepsi publik terhadap partai politik semakin dibentuk oleh narasi media daring dan perbincangan di ruang publik digital, bukan hanya dari pengalaman langsung atau relasi ideologis. Dengan demikian, penting untuk menelaah bagaimana narasi kegagalan PPP dikonstruksi melalui pemberitaan media dan opini tokoh publik, karena hal ini juga memengaruhi legitimasi partai di ruang publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif penyebab kegagalan Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu 2024, dengan pendekatan deskriptif melalui analisis isi media daring dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak relevan. Data yang dikaji berasal dari pemberitaan di media nasional serta wawancara dengan pengamat politik, mantan kader, dan simpatisan partai.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya dapat memetakan faktor-faktor penyebab kegagalan PPP dari sisi strategis dan struktural, tetapi juga mengungkap makna yang terkandung dalam wacana publik mengenai partai tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian partai politik dan demokrasi di Indonesia, serta menjadi refleksi bagi PPP dan partai lain dalam menavigasi tantangan elektoral di masa mendatang. Peristiwa ini tidak hanya menjadi pukulan telak bagi PPP, tetapi juga memicu spekulasi dan analisis mendalam mengenai berbagai elemen yang mungkin berkontribusi terhadap kegagalan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apa saja faktor yang mendasari kegagalan PPP untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Tinjauan Pustaka

Partai politik adalah kelompok atau organisasi yang terorganisir dengan baik dan stabil, yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok individu dengan tujuan, cita-cita, dan ideologi yang serupa. Mereka berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan kebijakan atau program yang telah mereka siapkan (Hendrawati, 2024). Partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi karena menjadi kendaraan bagi aspirasi politik masyarakat untuk diwujudkan dalam kebijakan publik. Partai politik berperan besar dalam setiap penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif maupun eksekutif.

Dalam sistem pemilu Indonesia, dikenal istilah ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*), yaitu persyaratan perolehan suara minimum yang harus diperoleh suatu partai politik untuk memperoleh kepastian kursi di DPR. Ambang batas parlemen diterapkan dengan untuk menciptakan sistem kepartaian yang lebih sederhana dan membangun sebuah sistem presidensial yang kuat dan didukung oleh lembaga-lembaga perwakilan yang efisien (Hasibuan & Wati, 2020).

Ada beberapa studi yang berhubungan dengan strategi partai politik dalam memenuhi ambang batas parlemen. Studi yang dilakukan oleh Widyana (2022) pada Partai Gelora, sebagai partai baru, partai gelora mempersiapkan diri dengan berbagai strategi untuk menghadapi pemilu agar bisa melampaui *parliamentary threshold* pada pemilu legislatif 2024. Pada kenyataan dengan berbagai strategi dan persiapan yang dilakukan oleh Partai Gelora hanya mendapat 0.84% suara. Penelitian Widyana tidak membahas secara mendalam mengenai penyebab gagalnya Partai Gelora dalam memenuhi ambang batas parlemen (Widyana, 2024).

Pada kajian Kurniasari (2021) tentang kegagalan Partai Hanura dalam memenuhi ambang batas parlemen pada pemilu legislatif 2019, terdapat kesamaan penyebab kegagalan Partai Hanura dan PPP dalam melampaui parliamentary threshold, yaitu faktor internal dan eksternal partai. Faktor internal berhubungan dengan perubahan kepemimpinan dan perubahan faksi dominan dalam partai, sementara faktor eksternal meliputi reformasi konstitusional, ketersediaan dana kampanye, dan

strategi koalisi. Namun belum ada analisis kualitatif tentang bagaimana persepsi pemilih terbentuk melalui media atau bagaimana partai-partai merespons tren generasi muda ini secara strategis

Penelitian lain terkait Partai Hanura dilakukan oleh Nurak & Bonefasius (2021) yang juga berhubungan dengan konflik internal partai dan dualisme kepemimpinan partai. Temuan mereka dalam penelitian tersebut adalah konflik internal dalam tubuh Partai Hanura berkontribusi terhadap penurunan drastis perolehan suara partai pada Pemilu Legislatif 2019. Partai Hanura mengalami keterpurukan signifikan, dengan perolehan suara hanya sebesar 1,54%, turun drastis dibandingkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2014 sebesar 5,26% suara.

Berdasarkan beberapa studi tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun telah banyak studi yang membahas penurunan performa partai, dampak ambang batas parlemen, dan strategi kampanye, belum ada penelitian yang secara komprehensif dan kualitatif membedah faktor internal dan eksternal secara bersamaan yang menyebabkan kegagalan PPP dalam Pemilu 2024. Penelitian ini dilakukan dengan melihat persepsi publik dan konstruksi media digital terkait PPP menjelang dan pasca Pemilu 2024, serta respons kader PPP terhadap realitas kekalahan, dilihat dari narasi yang dibangun dalam media dan hasil wawancara.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus untuk memahami dan menggali secara mendalam penyebab kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilu 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena atau peristiwa tertentu dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap (Achjar et al., 2023). Fokus utama penelitian ini adalah pada makna, persepsi, dan narasi yang berkembang di ruang publik digital serta pemahaman subjektif dari narasumber terkait sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami konteks sosial, budaya, politik dan sejarah yang melatarbelakangi fenomena tersebut

Penelitian studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendalam memeriksa fenomena dalam konteks yang nyata dan kompleks. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam dari beberapa kasus yang relevan dengan topik penelitian (Gunawan, 2022). Pendekatan studi kasus cocok digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang gagal memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2024. Kasus ini dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang untuk memahami dinamika politiknya.

Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Penggunaan data primer bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan realitas dari objek penelitian, melalui proses pengumpulan langsung dari narasumber (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Dengan demikian, data primer sangat penting karena memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Narasumber penelitian ini merupakan perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) dan juga sebagai Calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029 beliau bernama Bapak H. Belly Bilalusalam, SH. Yang diwawancara pada 16 Julni 2024. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen dan media daring seperti program partai, halaman berita, jurnal, artikel yang terdapat di situs online.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi data, yakni membandingkan temuan dari media daring dengan wawancara narasumber. Melalui triangulasi data, peneliti dapat membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai sumber data, seperti wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Hal ini membantu meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan teori Komunikasi Politik untuk menganalisis faktor-faktor kegagalan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pemilu 2024. Menurut Cecep Suryana melalui bukunya, komunikasi politik sejatinya adalah studi-studi mengenai segala macam hal dan proses politik yang memungkinkan terjadinya komunikasi, dan pada saat bersamaan, studi mengenai

komunikasi itu sendiri dengan melakukan analisis terhadap segala macam proses pengolahan, penyampaian dan penerimaan informasi berikut hal-hal lainnya sebagai dampak yang mempengaruhi sikap, opini, keyakinan, sistem nilai dan perilaku individu terhadap hal-hal politik ataupun proses-proses politik, baik melalui media ataupun tanpa melalui media. Cecep Suryana melihat bahwa komunikasi bukan hanya terjadi di media, tetapi juga merupakan bagian intrinsik dari setiap aktivitas politik. Proses-proses politik seperti pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, pemilihan umum, atau negosiasi antarpertai, yang mana itu semua merupakan bentuk komunikasi. Cecep Suryana juga menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan memengaruhi khalayak untuk tujuan politik, seperti memenangkan pemilu, membangun citra, atau meraih dukungan (Suryana, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Hasil PPP pada Pemilu Legislatif 2024

Hasil pemilu legislatif 2024 menjadi momen krusial bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang untuk pertama kalinya gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen, dengan hanya meraih 3,87 persen suara atau sekitar 5,8 juta suara sah. Kegagalan ini berdampak signifikan terhadap dinamika politik nasional, khususnya dalam representasi politik Islam, serta menimbulkan tantangan bagi PPP dalam mempertahankan eksistensinya di tengah kompetisi yang semakin ketat.

Tabel Perolehan Suara PPP Dari Pemilu 1973 - 2024

Tahun Pemilu	Jumlah Suara	Persentase Suara	Jumlah Kursi
1973	14.833.942	27,11	96
1977	18.722.138	29,29	99
1982	20.871.880	27,78	94

1987	13.701.428	15,97	61
1992	16.624.647	17,01	62
1997	25.340.028	22,43	89
1999	11.329.905	10,71	58
2004	9.248.764	9,15	58
2009	5.533.214	5,32	38
2014	8.157.488	6,53	39
2019	6.323.147	4,52	19
2024	5.878.777	3,87	Tidak mencapai Parlementary Threshold

Sumber : Kompas.com, 2024

Sebagai respons terhadap hasil pemilu, PPP mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait dapil Jawa Tengah III dan suara DPRD Rembang 2. Namun, gugatan ini ditolak akibat kurangnya bukti dan dalil permohonan yang dianggap tidak jelas. Keputusan ini semakin mempertegas posisi PPP di luar parlemen untuk periode 2024–2029, menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi partai dalam upayanya tetap relevan di panggung politik nasional.

Kegagalan ini memicu evaluasi internal yang mendalam. Achmad Baidowi yang merupakan salah satu Ketua DPP PPP, menekankan perlunya adaptasi terhadap perubahan politik, terutama dalam menarik pemilih muda di tengah bonus demografi yang akan datang (Kharisma, 2023). Sandiaga Uno, sebagai Ketua Bappilu PPP, menyampaikan permintaan maaf dan menyerukan konsolidasi internal guna memperkuat strategi menjelang Pemilu 2029. Sandiaga meminta PPP untuk melakukan perbaikan kinerja partai dan tetap terus berkonsolidasi dan kuncinya jangan sampai internal partai

terpecah yang memicu konflik yang berkelanjutan (Abdurrahman, 2024). PPP perlu merancang strategi politik yang lebih efektif untuk pemilu yang akan datang, termasuk perbaikan komunikasi dengan pemilih muda, konsolidasi internal, serta inovasi dalam pendekatan kampanye. Tanpa langkah konkret dan adaptasi terhadap dinamika politik yang berkembang, PPP berisiko semakin kehilangan relevansinya dalam konstelasi politik nasional.

Analisis Faktor Internal Kegagalan PPP dalam Memenuhi Parliamentary Threshold

Kegagalan PPP dalam Pemilu 2024 tidak lepas dari berbagai faktor internal yang melemahkan stabilitas dan kinerja partai. Pergantian kepemimpinan dari Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono menciptakan polemik yang berdampak negatif terhadap citra partai. Konflik internal yang berlarut-larut menurunkan kepercayaan publik dan semangat kerja kader, sementara kurangnya konsolidasi serta koordinasi antara pimpinan pusat dan daerah semakin memperburuk kondisi partai.

Minimnya kegiatan di tingkat akar rumput juga menyebabkan PPP kehilangan basis pemilih tradisionalnya. Selain itu, pernyataan kontroversial Suharso Monoarfa mengenai pemberian amplop kepada Kiai menimbulkan resistensi di kalangan ulama dan pemilih Muslim. Kesalahan strategi komunikasi semakin memparah citra PPP di mata public (Saubani, 2022). Cecep Suryana menguraikan beberapa unsur dari teori Komunikasi Politik salah satunya ialah komunikator. Suharso Monoarfa, sebagai komunikator politik, gagal menjaga kredibilitasnya di hadapan khalayak (pemilih Muslim dan ulama). Pernyataan kontroversial mengenai "amplop kepada Kiai" tidak hanya menciptakan miskomunikasi, tetapi juga merusak citra dirinya dan citra partai secara keseluruhan. Ini menunjukkan ketidakmampuan komunikator untuk mengendalikan pesan dan memahami sensitivitas khalayak.

Teori Komunikasi Politik menekankan pentingnya manajemen krisis untuk mempertahankan citra partai. PPP terbukti gagal dalam aspek ini. Konflik internal dan pernyataan kontroversial seharusnya ditangani dengan cepat dan efektif untuk meredam dampak negatif. Namun, karena konflik

berlarut-larut, partai gagal memberikan narasi tandingan yang kuat. Akibatnya, citra negatif terus berkembang di ruang publik, menurunkan kepercayaan dan semangat kader serta pemilih.

Dukungan PPP terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden juga dinilai tidak sesuai dengan preferensi sebagian basis pemilihnya berkontribusi terhadap perolehan suara partai (Saptohutomo, 2024b). Hal ini diperkuat oleh Belly Bilalusalam ketika diwawancara secara langsung pada 16 Juli 2024 mengatakan: “Dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih berkoalisi dengan PDIP dan mendukung Capres Ganjar Pranowo maka itu sangat merugikan dirinya sebagai caleg (yang pada dasarnya dia lebih condong kepada Capres Anis Baswedan) dan juga caleg lainnya dari PPP. Karena hal itu menimbulkan stigma di umat bahwa jika memilih PPP atau caleg dari PPP berarti mendukung Capres Ganjar Pranowo dan PDIP.” Dengan demikian, konflik kepemimpinan, kesalahan komunikasi politik, keputusan strategis yang kontroversial menjadi faktor internal yang menyebabkan PPP gagal memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024

Setelah memahami berbagai faktor yang menyebabkan kegagalan PPP dalam memenuhi ambang batas parlemen, salah satu faktor penting adalah konflik kepemimpinan di internal partai. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi soliditas organisasi, tetapi juga berdampak langsung pada strategi politik dan perolehan suara PPP di pemilu.

Konflik Kepemimpinan di Internal Partai

Kegagalan PPP dalam memenuhi ambang batas parlemen pada pemilu legislatif 2024 dipengaruhi oleh konflik internal yang berlarut-larut. Pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan penunjukan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum menimbulkan ketidakstabilan di dalam tubuh partai, mengurangi kepercayaan publik, serta melemahkan semangat kader (Amin, 2022 ; Saptohutomo, 2024a). Konflik internal bukanlah fenomena baru bagi PPP. Pada era kepemimpinan John Naro, perselisihan antara faksi Parmusi dan Nahdlatul Ulama (NU) memicu fragmentasi partai dan melemahkan konsolidasi politik, yang berdampak pada penurunan elektoral

pada Pemilu 1988. Situasi yang sama terjadi pada 2014 ketika partai terpecah antara kubu Suryadharma Ali (SDA) dan M. Romahurmuziy. Dualisme kepemimpinan ini menyebabkan disorientasi kader dan pemilih, diperburuk oleh skandal korupsi SDA yang merusak citra partai sebagai partai berbasis Islam (Saptohutomo, 2022).

Dalam konteks pemilu legislatif 2024, lemahnya konsolidasi antara pusat dan daerah serta minimnya strategi komunikasi yang efektif semakin memperburuk posisi PPP. Konflik kepemimpinan yang berkepanjangan, fragmentasi internal, serta kegagalan dalam menjaga hubungan dengan basis pemilih tradisional, khususnya dari kalangan NU, menjadi faktor utama yang menyebabkan PPP kehilangan dukungan elektoralnya. Akibatnya, partai ini gagal memenuhi *parliamentary threshold* dan tidak dapat mengirimkan wakilnya ke DPR RI untuk periode 2024–2029.

Konflik internal di tubuh PPP menjadi faktor utama dalam penurunan suara partai, terutama pada masa kepemimpinan Suryadharma Ali dan Suharso Monoarfa (Saptohutomo, 2022). Dualisme kepemimpinan, citra negatif akibat kasus korupsi, serta kegagalan konsolidasi mengakibatkan hilangnya dukungan pemilih tradisional PPP. Ketidakmampuan partai menyelesaikan konflik secara cepat dan efektif melemahkan mesin politiknya serta menurunkan legitimasi di mata publik.

Pada masa lalu, PPP dikenal memiliki kepemimpinan yang solid dan mampu menjaga kohesi internal, tetapi ketidakstabilan belakangan ini menunjukkan pola berulang dalam sejarah partai. Pergantian kepemimpinan yang tiba-tiba, seperti pemberhentian Suharso Monoarfa pada 2022, memunculkan kesan bahwa partai tidak mampu mengelola dinamika internalnya dengan baik, sehingga merusak citra di hadapan pemilih. Selain itu, pernyataan kontroversial Suharso terkait pemberian amplop kepada Kiai semakin memperburuk hubungan PPP dengan basis pemilihnya dari kalangan pesantren. Konflik berkepanjangan dalam PPP juga mengindikasikan ketidaksepakatan luas di antara faksi-faksi internal. Ketika partai lebih berfokus pada penyelesaian konflik internal, upaya konsolidasi dan strategi kampanye menjadi terhambat. Pergantian kepemimpinan di tengah periode kepemimpinan, seperti penunjukan Muhammad Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum, membuat proses

konsolidasi semakin sulit, mengurangi efektivitas mobilisasi pemilih. Dengan demikian, ketidakstabilan internal ini berdampak langsung pada kegagalan PPP dalam memenuhi ambang batas parlemen pada pemilu legislatif 2024 (Amin, 2022).

PPP mengalami konflik kepemimpinan berulang yang melemahkan stabilitas internal dan menurunkan kepercayaan publik. Pergantian pemimpin yang tidak konsisten menciptakan citra partai yang lemah dan terfragmentasi, sehingga memicu migrasi pemilih ke partai lain yang lebih stabil (Sufa, 2023). Pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum semakin memperburuk kondisi partai, terciptanya ketidakpastian, melemahkan loyalitas pemilih, serta menghambat fokus dalam kampanye dan konsolidasi (Amin, 2022).

Minimnya kegiatan partai di tingkat akar rumput dan kurangnya koordinasi antara pimpinan pusat dengan daerah turut mempercepat penurunan elektabilitas PPP (Nur, 2024). Dalam perspektif komunikasi politik, konflik kepemimpinan ini menyebabkan disonansi dalam penyampaian pesan politik partai, sehingga melemahkan efektivitas mobilisasi kader dan dukungan pemilih. Ketidakharmonisan komunikasi vertikal antara pusat dan daerah memperburuk koordinasi internal, menyebabkan mesin politik PPP tidak berfungsi optimal dalam Pemilu 2024. Situasi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif sangat bergantung pada kepemimpinan yang stabil, sistem komunikasi yang jelas, serta konsistensi dalam penyampaian pesan politik. Ketidakmampuan PPP dalam mengatasi konflik internal dan membangun komunikasi yang harmonis berkontribusi pada kegagalan partai dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.

Selain konflik internal yang melemahkan konsolidasi partai, kesalahan dalam strategi komunikasi politik juga menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi citra dan daya tarik PPP di mata publik. Kelemahan ini berdampak pada penyampaian pesan politik yang kurang efektif, sehingga mengurangi kemampuan partai untuk mempertahankan dan memperluas basis pemilihnya.

Kesalahan Komunikasi

Kesalahan komunikasi juga menjadi faktor yang merusak citra PPP yang akhirnya mempengaruhi kepercayaan publik dan dukungan pemilih. Pidato Suharso Monoarfa yang menyebutkan tentang pemberian amplop kepada kiai dianggap merendahkan para ulama dan menciptakan citra buruk di mata publik DetikNews melaporkan bahwa pidato tersebut tidak hanya merendahkan martabat kiai tetapi juga mencoreng nama baik partai yang selama ini dikenal dekat dengan komunitas keagamaan (DetikNews, 2022).

Pidato tersebut tidak hanya menciptakan keretakan internal, tetapi juga merusak hubungan PPP dengan basis pemilih tradisionalnya, yang sebagian besar terdiri dari umat Muslim dan para ulama. Hal ini memicu resistensi di kalangan masyarakat dan menurunkan elektabilitas partai. Konflik ini diperparah dengan adanya somasi yang dilayangkan oleh beberapa kader PPP kepada Suharso Monoarfa, yang semakin memperlihatkan ketidakharmonisan internal di tubuh partai (Saubani, 2022). Selain itu, kesalahan komunikasi ini mengakibatkan serangkaian permintaan maaf dan klarifikasi dari pihak partai, yang justru menambah kebingungan dan kesan ketidakprofesionalan dalam mengelola isu-isu internal. Tirto.id mencatat bahwa respon partai terhadap isu 'amplop kiai' terkesan lamban dan tidak terkoordinasi, yang semakin memperburuk pandangan publik terhadap Partai Persatuan Pembangunan (Taher, 2022).

Teori komunikasi politik Cecep Suryana menempatkan komunikator sebagai unsur kunci yang harus memiliki kredibilitas dan kepekaan. Dalam kasus ini, Suharso Monoarfa sebagai komunikator politik utama PPP telah gagal. Pidatonya mengenai "amplop kepada kiai" dianggap merendahkan, yang secara langsung merusak kredibilitasnya dan citra partai. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan komunikator untuk memahami sensitivitas khalayak, terutama basis pemilih tradisional PPP (ulama dan umat Muslim). Adanya somasi dari kader internal semakin mempertegas kegagalan komunikator dan manajemen partai dalam mengendalikan perpecahan.

Kesalahan komunikasi lainnya adalah kurangnya upaya partai untuk menjelaskan dan

mempromosikan program-program unggulannya kepada masyarakat. Dalam kampanye pemilu, kemampuan untuk mengkomunikasikan visi, misi, dan program kerja partai secara efektif kepada pemilih adalah kunci keberhasilan. Namun, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tampaknya belum mampu mengoptimalkan saluran komunikasi yang ada untuk menyampaikan pesan-pesan penting tersebut. Hal ini terlihat dari minimnya kegiatan kampanye yang melibatkan langsung masyarakat dan kurangnya penggunaan media sosial secara efektif untuk menarik perhatian pemilih muda. Menurut Belly Bilalusalam, perwakilan DPP PPP dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 5, "PPP tidak melakukan gebrakan yang menarik dalam kampanye atau rebranding untuk menarik pemilih baru," yang menunjukkan bahwa strategi komunikasi partai masih belum mampu beradaptasi dengan dinamika politik dan preferensi pemilih saat ini. Belly Bilalusalam juga menyoroti pentingnya tokoh-tokoh muda dalam struktur partai untuk menarik perhatian pemilih muda, namun ini belum sepenuhnya diimplementasikan oleh PPP. Pesan politik yang disampaikan harus relevan dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Poin dari Pak Belly Bilalusalam, bahwa PPP minim dalam mempromosikan program-programnya, menunjukkan kegagalan dalam mengirimkan pesan positif dan konstruktif. Partai tidak mampu mengkomunikasikan visi, misi, dan program kerjanya secara efektif, terutama kepada pemilih muda, sehingga mereka tidak melihat alasan kuat untuk mendukung PPP.

Kesalahan komunikasi ini menunjukkan ketidakmampuan partai dalam mengelola pesan dan citra publiknya secara baik. Kurangnya strategi komunikasi yang terkoordinasi dan responsif terhadap isu-isu sensitif membuat PPP rentan terhadap serangan kampanye hitam dan disinformasi.

Keputusan Strategis yang Kontroversial

Selain itu, keputusan strategis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memilih koalisi dan mendukung calon presiden tertentu, seperti dukungan untuk Ganjar Pranowo, dinilai tidak tepat dan mengecewakan basis pemilih PPP. Hal ini juga menyebabkan penurunan dukungan terhadap partai (Firdausi, 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan Belly Bilalusalam pada 16 Juli 2024, seorang



JOURNAL OF POLITICS AND
DEMOCRACY STUDIES

PARAPOLITIKA

Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)

Volume 6 Nomor 2, Februari-Agustus 2025

ISSN 2721-771X (Online)

10.33822/jpds.v6i2.10878

<https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/>

perwakilan DPP PPP dan Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 5, terdapat beberapa faktor internal yang turut menyebabkan kegagalan PPP dalam memenuhi *parliamentary threshold*. Belly Bilalusalam menyatakan bahwa salah satu alasan utama adalah salah memilih koalisi dan pasangan calon presiden. Beliau mengatakan kalau di Jakarta, mayoritas konstituen dan pejabat PPP memilih Anis Baswedan sebagai calon presiden karena dirasa dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai gubernur Jakarta dan juga dekat dengan umat Islam.

Hal ini mungkin berbeda di daerah lain yang mayoritas memilih Prabowo. Belly Bilalusalam juga menyoroti bahwa meskipun kondisi internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 2024 sudah lebih baik dibandingkan 2019, masih ada konflik internal yang mempengaruhi stabilitas partai, seperti pemberhentian tiba-tiba ketua partai sebelumnya. "Hal ini sangat disayangkan karena akhirnya arah kebijakan politik yang dimiliki PPP tetap seperti pemilu 2019,". Belly Bilalusalam juga menambahkan bahwa kesalahan berulang dalam memilih koalisi dan pasangan presiden memberikan dampak negatif yang besar bagi partai, dengan pemilih tradisional merasa partai tidak mendengarkan suara mereka.

Berdasarkan komunikasi politik, hal ini menunjukkan kegagalan PPP dalam memahami basis pemilih mereka. Perwakilan DPP PPP, Belly Bilalusalam, secara spesifik menyebutkan bahwa konstituen di Jakarta lebih memilih Anies Baswedan karena kedekatannya dengan umat Islam, sementara mayoritas di daerah lain memiliki preferensi berbeda (Prabowo). Hal ini membuktikan bahwa pesan strategis PPP tidak sejalan dengan preferensi basis pemilih mereka sehingga menyebabkan ketidakpuasan dan hilangnya dukungan terhadap PPP.

Kurangnya Inovasi dalam Kampanye untuk Menarik Pemilih Muda

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi tantangan besar dalam upayanya menarik perhatian pemilih muda selama kampanye Pemilu 2024. Salah satu kelemahan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya inovasi dalam program kampanye. Meskipun generasi muda sekarang

lebih terhubung dengan teknologi dan media sosial, PPP belum mampu memanfaatkan saluran ini secara efektif untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Kegagalan PPP dalam meraih ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 juga dapat dianalisis dari ketidakmampuan partai untuk beradaptasi dengan pergeseran demografi pemilih. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, berpendapat bahwa kegagalan ini merupakan buntut dari ketidakmampuan PPP dalam memetakan dan menjangkau pemilih muda yang kini mendominasi populasi pemilih, yaitu Gen Z dan Gen Y yang mencapai 60% dari total pemilih (Setuningsih, 2024).

PPP dinilai tidak melakukan perubahan gaya komunikasi dan penetrasi politik yang diperlukan untuk menarik pemilih muda, pesan dan model kampanye yang digunakan oleh para calon anggota legislatif (caleg) PPP gagal memahami preferensi politik pemilih muda. Hal ini menyebabkan PPP kalah bersaing dengan partai-partai lain yang lebih adaptif dalam menggunakan media sosial dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang relevan dengan pemilih muda (Setuningsih, 2024). Hal ini diperkuat dengan perkataan Bely Bilalusalam yang mengatakan "PPP tidak melakukan gebrakan yang menarik dalam kampanye atau rebranding untuk menarik pemilih baru." Ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi partai masih belum mampu beradaptasi dengan dinamika politik dan preferensi pemilih saat ini.

Situasi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa basis pemilih tradisional PPP semakin berkurang seiring waktu, sementara partai gagal menciptakan model komunikasi politik baru yang dapat diterima oleh pemilih muda. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki basis loyal, partai politik modern harus terus berinovasi dalam komunikasi agar tetap relevan dan mampu menjaring dukungan dari generasi baru. Komunikasi politik membentuk citra partai. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang secara historis kuat di basis tradisional, gagal membangun citra baru untuk menjangkau pemilih muda. Situasi ini diperparah dengan basis pemilih tradisional yang kian berkurang, sementara partai tidak berhasil menciptakan model komunikasi politik baru untuk generasi baru.

Analisis Faktor Eksternal Kegagalan PPP dalam Memenuhi Parliamentary Threshold

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghadapi berbagai tantangan eksternal yang berkontribusi pada kegagalannya memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. Salah satu faktor utama adalah fragmentasi partai-partai Islam, yang menyebabkan suara pemilih Muslim terpecah dan melemahkan basis tradisional PPP. Selain itu, munculnya partai-partai baru dengan visi modern semakin menggerus daya tarik PPP, terutama di kalangan pemilih milenial dan Gen Z yang lebih progresif (Nur, 2024). PPP juga menghadapi isu kampanye hitam dan hoaks yang merusak citra partai di media sosial buntut dari konflik internal, serta ketidakpuasan terhadap koalisi politik dan calon presiden yang didukung partai. Faktor ini semakin memperburuk persepsi publik terhadap PPP menjelang pemilu (Annur, 2023). Selain tantangan eksternal, kegagalan kepemimpinan dalam mengelola konflik internal turut memperburuk kondisi partai. Para elite PPP dikritik karena gagal mengonsolidasikan kekuatan partai dan lebih sering mempertontonkan konflik secara terbuka. Kondisi ini memicu ketidakpuasan pemilih dan melemahkan kepercayaan publik terhadap PPP sebagai partai Islam yang solid. Hampir semua faktor eksternal ini merupakan akibat dari kesalahan internal yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Di antara berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi kegagalan PPP dalam memenuhi ambang batas parlemen, fragmentasi dan persaingan di kalangan partai Islam menjadi salah satu isu paling menonjol. Kondisi ini menciptakan perebutan basis pemilih yang sama, sehingga suara yang seharusnya dapat menjadi modal politik PPP justru terpecah ke partai-partai Islam lainnya.

Fragmentasi dan Persaingan di Kalangan Partai Islam

PPP dalam memenuhi ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 dipengaruhi fragmentasi di kalangan partai Islam, yang menyebabkan terpecahnya suara pemilih Muslim tradisional PPP. Persaingan dengan partai Islam lain menciptakan kebingungan di kalangan pemilih, sehingga basis dukungan PPP semakin melemah (Nur, 2024). Hal ini diperkuat dengan jawaban dari Belly

Bilalusalam yang mengatakan: “Sebagai perwakilan dari PPP Jakarta, hasil pemilu yang kurang baik diakibatkan karena adanya kesalahan yang berulang. Salah satunya adalah salah memilih koalisi dan presiden yang kemudian berimbang kepada kepercayaan publik terhadap PPP, termasuk hilangnya traditional voters. Selain pemilih yang berpindah suara ke partai lain, pemilih tradisional yang kehilangan haknya untuk memilih karena meninggal dunia dan tidak ada yang menggantikannya mereka di generasi berikutnya juga menjadi penyebab berkurangnya “traditional voters” atau pemilih tradisional PPP dari tahun ke tahun.”

Selain itu, munculnya partai-partai baru dengan visi yang lebih modern dan progresif semakin menggerus daya tarik PPP, terutama di kalangan pemilih milenial dan Gen Z. Generasi muda cenderung memilih partai yang menawarkan kebaruan dan gagasan yang lebih relevan dengan aspirasi mereka, sementara PPP masih dianggap sebagai partai tradisional yang kurang adaptif terhadap perubahan zaman (Yesidora, 2023).

Perubahan preferensi pemilih Muslim yang lebih terdidik dan pragmatis juga turut berdampak pada penurunan suara PPP. Banyak pemilih dari segmen ini lebih memilih partai nasionalis atau partai dengan program konkret yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks fragmentasi politik, PPP menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan loyalitas pemilih karena persaingan yang semakin ketat di antara partai Islam lain yang lebih mampu menarik perhatian pemilih muda dan berpendidikan (Rosman, 2023). Dengan demikian, kombinasi dari fragmentasi partai Islam, pergeseran preferensi pemilih, serta meningkatnya daya saing partai-partai baru menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap kegagalan PPP dalam Pemilu 2024.

Ketidakpuasan Terhadap Pilihan Koalisi dan Calon Presiden

PPP dalam memenuhi ambang batas parlemen pada pemilu legislatif 2024 dipengaruhi oleh ketidakpuasan terhadap strategi koalisi dan pilihan calon presiden. Pemilih tradisional PPP menilai keputusan partai untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Pranowo tidak

sesuai dengan aspirasi mereka. Hal ini mengakibatkan peralihan dukungan ke partai lain, terutama yang mengusung kandidat yang lebih populer di kalangan pemilih Muslim, seperti Anies Baswedan. Ketidakpuasan ini juga diperkuat oleh pernyataan tokoh internal PPP, yang menilai bahwa strategi koalisi yang dipilih justru merugikan partai secara elektoral. Teori komunikasi politik menekankan bahwa pesan harus selaras dengan nilai dan harapan khalayak. Dalam kasus PPP, keputusan untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Pranowo dianggap sebagai "pesan" politik yang tidak sesuai dengan preferensi pemilih tradisionalnya.

Selain itu, kampanye hitam dan disinformasi melalui media sosial turut memperburuk citra PPP. Kampanye negatif menciptakan stigma bahwa memilih PPP berarti mendukung pasangan calon yang kurang disukai oleh basis pemilihnya, sehingga menurunkan elektabilitas partai. Penyebaran disinformasi semakin memperkuat persepsi negatif terhadap PPP dan menyebabkan partai kesulitan mengkomunikasikan strategi politiknya secara efektif kepada pemilih. PPP terbukti tidak mampu mengendalikan narasi negatif yang beredar. Kampanye negatif menciptakan stigma bahwa memilih PPP sama dengan mendukung kandidat yang tidak disukai, dan partai tidak memiliki strategi komunikasi yang efektif untuk melawan narasi tersebut. Akibatnya, opini publik terbentuk secara negatif dan merugikan elektabilitas partai.

Dalam konteks komunikasi politik, ketidakmampuan PPP dalam menjelaskan keputusan strategisnya kepada pemilih menjadi faktor yang memperparah penurunan dukungan. Koalisi dan strategi pencapresan yang tidak selaras dengan preferensi pemilih, serta kampanye hitam yang merusak citra partai, menjadi faktor eksternal utama yang berkontribusi terhadap kegagalan PPP dalam memenuhi parliamentary threshold pada Pemilu 2024.

Dinamika Politik PPP dalam Pemilu 2024

Pemilu 2024 menjadi ujian krusial bagi PPP dalam mempertahankan eksistensinya di panggung politik nasional. Dengan penerapan ambang batas parlemen sebesar 4 persen, partai harus

memperoleh minimal 4 persen suara nasional agar dapat mengirimkan wakilnya ke DPR RI. Namun, PPP hanya meraih 3,87 persen suara, sehingga gagal memenuhi *parliamentary threshold* untuk pertama kalinya sejak didirikan.

PPP memiliki platform politik yang fokus pada penguatan pendidikan agama Islam dan pengembangan pondok pesantren. PPP berhasil mendorong legislasi terkait perlindungan pondok pesantren (UU P3) di parlemen, yang mewajibkan negara mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan dan pemeliharaan pesantren. Selain fokus utama pada sektor keagamaan, PPP juga menambahkan program-program tambahan seperti bantuan sosial berupa sembako murah dan pembukaan lapangan pekerjaan. Produk politik yang dikeluarkan oleh PPP mencerminkan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan kelompok muslim dan pendidikan agama Islam. Hal ini juga menjadi gambaran dari hasil kerja PPP dalam periode-periode sebelumnya (Argiana et al., 2025). Namun, berbagai tantangan internal dan eksternal menghambat efektivitas strategi ini. Konflik kepemimpinan, seperti pergantian mendadak Ketua Umum dari Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono, melemahkan konsolidasi internal dan menciptakan persepsi negatif di kalangan kader serta pemilih. Selain itu, minimnya mobilisasi di tingkat akar rumput membuat mesin politik partai tidak berjalan optimal.

Di sisi eksternal, fragmentasi suara partai-partai Islam, ketidakpuasan terhadap koalisi dan pilihan calon presiden, serta kampanye hitam melalui media sosial semakin memperburuk citra PPP. Pemilih tradisional partai ini cenderung berpindah ke partai lain yang dinilai lebih merepresentasikan aspirasi mereka. Upaya hukum melalui Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi juga tidak membawa hasil, mengukuhkan kegagalan PPP dalam Pemilu 2024 (Kumalasanti & Basyari, 2024). Kegagalan PPP dalam memenuhi *parliamentary threshold* mencerminkan perubahan dinamika politik Indonesia, di mana partai-partai berbasis ideologi Islam menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansi di tengah pergeseran preferensi pemilih. Evaluasi menyeluruh terhadap strategi politik dan komunikasi partai menjadi hal yang mendesak bagi

PPP untuk merevitalisasi posisinya dalam kontestasi politik mendatang.

Dinamika politik nasional menunjukkan bahwa umat Muslim yang lebih terdidik dan cenderung pragmatis memilih partai dengan agenda nasionalis atau program konkret, daripada partai Islam tradisional seperti PPP. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa partai politik yang gagal beradaptasi dengan perubahan preferensi pemilih cenderung mengalami penurunan dukungan. Studi tentang Partai Gelora menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang kuat dan adaptif dapat meningkatkan daya saing partai baru (Widyana, 2024). Sementara itu, penelitian tentang kegagalan Partai Hanura dalam pemilu legislatif 2019 oleh Kurniasari (2021) ; Nurak & Bao (2021) mengungkap bahwa konflik internal dan lemahnya konsolidasi kepemimpinan berkontribusi terhadap penurunan suara partai. Persoalan serupa terjadi pada PPP, di mana ketidakstabilan kepemimpinan dan kurangnya konsolidasi internal melemahkan daya tarik partai di mata publik (Kurniasari, 2021) (Nurak & Bonefasius, 2021). Analisis ini menegaskan bahwa stabilitas kepemimpinan, konsolidasi internal, serta strategi komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam mempertahankan dukungan pemilih. Bagi PPP, evaluasi menyeluruh terhadap strategi politik dan komunikasi menjadi langkah penting untuk mengembalikan relevansinya dalam peta politik nasional.

Teori komunikasi politik menekankan pentingnya konsolidasi internal dan strategi komunikasi yang efektif dalam membangun citra positif partai di mata publik (Ziaulhaq, 2019). Kegagalan PPP dalam memenuhi ambang batas parlemen pada pemilu legislatif 2024 mengindikasikan lemahnya strategi komunikasi politik partai, baik secara internal maupun eksternal. Komunikasi politik yang efektif tidak hanya bergantung pada isi pesan, tetapi juga pada cara penyampaiannya kepada audiens yang tepat (Syarbaini et al., 2021). PPP dinilai gagal memahami perubahan preferensi pemilih muda yang lebih menginginkan partai dengan visi modern dan progresif. Selain itu, konflik kepemimpinan dan lemahnya konsolidasi internal menunjukkan ketidakmampuan partai dalam mengelola dinamika politik yang kompleks. Teori komunikasi politik menegaskan bahwa partai harus mampu beradaptasi

dengan perubahan sosial dan politik agar tetap relevan di mata pemilih (Nuraliza et al., 2024).

Untuk kembali meraih dukungan, PPP perlu melakukan reformasi strategi komunikasi politiknya, termasuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan konsolidasi internal, serta mengembangkan pendekatan komunikasi yang lebih efektif dalam menarik pemilih muda. Responsivitas terhadap perubahan preferensi pemilih dan adaptasi terhadap dinamika politik yang terus berkembang menjadi kunci bagi PPP dalam membangun kembali relevansinya di panggung politik nasional.

Kesimpulan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai salah satu partai Islam tertua di Indonesia, mengalami kegagalan historis dalam pemilu legislatif 2024 dengan hanya memperoleh 3,87 persen suara, di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Akibatnya, PPP tidak dapat mengirimkan wakilnya ke DPR RI, menandai pencapaian terendah dalam sejarah partai.

Kegagalan ini disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara internal, konflik kepemimpinan, minimnya konsolidasi kader, serta kesalahan strategi komunikasi politik melemahkan dukungan terhadap PPP. Perpecahan di tingkat elite, termasuk pemberhentian Suharso Monoarfa, menciptakan citra negatif dan mengurangi soliditas partai. Di sisi eksternal, fragmentasi partai Islam, kemunculan partai baru yang lebih menarik bagi pemilih muda, serta perubahan preferensi politik generasi milenial dan Gen Z semakin memperburuk posisi PPP. Selain itu, kampanye negatif dari pesaing dan disinformasi turut berkontribusi terhadap menurunnya dukungan publik.

Kegagalan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin mempertegas posisi PPP di luar parlemen untuk periode 2024–2029. Teori komunikasi politik menunjukkan bahwa keberhasilan partai sangat bergantung pada efektivitas strategi komunikasi dan konsolidasi internal. Dalam konteks ini, PPP perlu melakukan reformasi signifikan dengan memperbaiki sistem komunikasi politiknya, membangun koordinasi yang lebih baik antara

pusat dan daerah, serta menyesuaikan strategi kampanye agar lebih relevan bagi pemilih muda. Tanpa langkah-langkah perbaikan yang konkret, PPP berisiko semakin kehilangan relevansinya dalam lanskap politik nasional..

Referensi

- Abdurrahman, S. (2024). PPP Kalah Pemilu 2024, Sandiaga Minta Internal Partai Tak Picu Konflik Berkelanjutan. *Tempo.Co*, 1. https://www.tempo.co/politik/PPP-kalah-pemilu-2024-sandiaga-minta-internal-partai-tak-picu-konflik-berkelanjutan-48602#goog_rewared
- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=yp7NEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA43&dq=Metode+penelitian+kualitatif:+Panduan+praktis+untuk+analisis+data+kualitatif+dan+studi+kasus.+PT.+Sonpedia+Publishing+Indonesia.&ots=E59PvToRAa&sig=VGJz1qDb0xwxsm_nI1wGg3k2JKs
- Amin, I. (2022, September). Mardiono Plt Ketum PPP: Diawali Fatwa Pemecatan Suharso Monoarfa. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/mardiono-plt-ketum-ppp-diawali-fatwa-pemecatan-suharso-monoarfa-gvRA>
- Annur, C. M. (2023). Hoaks di Media Sosial Meningkat Jelang Kampanye Pemilu 2024. *Databoks.Katadata.Co.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/29/hoaks-di-media-sosial-meningkat-jelang-kampanye-pemilu-2024>
- Argiana, G., Marfariza, H. A., Patmala, H., Nurmala, M., Fahrizal, M., & Tazkiya, N. R. (2025). Marketing Politik Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilihan Umum 2024. *Gunung Djati Conference Series*, 50(3), 148–164. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- DetikNews, T. (2022). Suharso Monoarfa Ungkap “Tradisi Amplop untuk Kiai” ke KPK, PPP Minta Maaf. *Detik.Com*. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6241486/suharso-monoarfa-ungkap-tradisi-amplop-untuk-kiai-ke-kpk-ppp-minta-maaf>
- Firdausi. (2024). Tak Masuk Parlemen, PPP Dinilai Salah Pilih Teman Koalisi di Pilpres 2024. *SinPo.Id*. <https://sinpo.id/detail/69618/tak-masuk-parlemen-ppp-dinilai-salah-pilih-teman-koalisi>

di-pilpres-2024

Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.

Hasibuan, S. fuj. lestari, & Wati, Y. (2020). Pemberlakuan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.57084/jpj.v1i1.246>

Hendrawati, S. (2024). Analisis Fungsi Pemilu Dan Tujuan Partai Politik Dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 140–147. <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/108%0Ahttps://resjustitia.lppm binabangsa.id/index.php/home/article/download/108/99>

Kharisma, A. (2023). Bahas Regenerasi Partai, PPP Tegaskan Pentingnya Peran Pemuda. *DetikNews*. <https://news.detik.com/pemilu/d-6553237/bahas-regenerasi-partai-ppp-tegaskan-pentingnya-peran-pemuda>

Kumalasanti, S. R., & Basyari, I. (2024). Seluruh Gugatan Tak Diterima MK, PPP Dipastikan Terlempar dari Senayan. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/artikel/seluruh-gugatan-tak-diterima-mk-ppp-dipastikan-terlempar-dari-senayan>

Kurniasari, L. (2021). TERPENTAL DARI SENAYAN: FAKTOR PENYEBAB PARTAI HANURA TIDAK LOLOS AMBANG BATAS PARLEMEN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. <https://etd.ums.ac.id/id/eprint/4713/>

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Nur, M. F. (2024). Nasib PPP di Pileg 2024 yang Terseok-seok Menembus Senayan. *Tirto.Id*. https://tirto.id/nasib-ppp-di-pileg-2024-yang-terseok-seok-menembus-senayan-gVYF?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc

Nurak, A., & Bonefasius, B. (2021). Konflik Internal Partai Politik studi tentang Dualisme Kepemimpinan Partai Hanura. *Jurnal JENDELA*, 1–11. <http://ojs.ustj.ac.id/jendela/article/view/927>

Nuraliza, V., Andhi Nur Rahmadi, Alvan Mubaroq, Kristiyono Kristiyono, Alisyia Putri Melani, & Anila Ifana. (2024). Peran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik Menghadapi

Pemilu 2024. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(1), 245–261.
<https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i1.2514>

Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51.
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>

Prasetyo, A. Y. (2024). Sejarah dan Pencapaian Kursi PPP di Pemilu. *Kompas.Id*.
<https://www.kompas.id/baca/riset/2024/05/23/sejarah-dan-pencapaian-kursi-ppp-di-pemilu>

Rosana, E. (2012). Politik Partai Politik dan Pembangunan. *TAPIS*, 8.

Rosman, A. (2023). Mengintip Strategi PPP Gaet Pemilih Muda di Pemilu 2024. *Katadata.Co.Id*.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/648c25390dc4b/mengintip-strategi-ppp-gaet-pemilih-muda-di-pemilu-2024>

Saptohutomo, A. P. (2022). Kilas Balik Deretan Konflik Internal di PPP. *Kompas.Com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/05/15300661/kilas-balik-deretan-konflik-internal-di-ppp?page=all>

Saptohutomo, A. P. (2024a). PPP Tak Lolos ke Parlemen Diduga Imbas Konflik Internal Bikin Kader Tak Solid. *Nasional.Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/20185871/ppp-tak-lolos-ke-parlemen-diduga-imbas-konflik-internal-bikin-kader-tak>

Saptohutomo, A. P. (2024b). Tak Lolos ke DPR, PPP Dianggap Tak Diuntungkan Dukung Ganjar-Mahfud. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/20110661/tak-lolos-ke-dpr-ppp-dianggap-tak-diuntungkan-dukung-ganjar-mahfud>.

Saubani, A. (2022). Buntut Pidato “Amplop Kiai”, Ketum PPP Suharso Manoarfa Dilaporkan. *Republika.Co.Id*. <https://news.republika.co.id/berita/rh0ls4409/buntut-pidato-amplop-kiai-ketum-ppp-suharso-manoarfa-dilaporkan>

Setuningsih, N. (2024). PPP Tak Lolos ke Parlemen Buntut “Gagap” Menghadapi Perubahan Pemilih. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/11/22185831/ppp-tak-lolos-ke-parlemen-buntut-gagap-menghadapi-perubahan-pemilih?page=all>

Sufa, I. G. (2023). Waketum PPP: Kami Yakin Survive di Pemilu 2024, Patahkan Temuan Survei. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/indepth/wawancara/6487e3930ea14/waketum-ppp-kami-yakin-survive-di-pemilu-2024-patahkan-temuan-survei>

Suryana, C. (2017). KOMUNIKASI POLITIK, Teori dan Praktik. In *CV. Mimbar Pustaka* (Vol. 4, Issue 1).

Syarbaini, S., Nur, S. M., & Anom, E. (2021). Teori , Media Dan Strategi komunikasi politik. *Jakarta Esa Unggul*, 127–135. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Books-22242-10_0073.pdf

Taher, A. P. (2022). Gejolak PPP & Keseleo Lidah Suharso Pengaruhi Soliditas KIB? *Tirto.Id*. <https://tirto.id/gejolak-ppp-keseleo-lidah-suharso-pengaruhi-soliditas-kib-gvwG>

Watoni, S., & Puspitarini, R. C. (2022). STRATEGI PARTAI POLITIK BARU: STUDI KASUS STRATEGI PARTAI POLITIK JARING DUKUNGAN MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(1), 4297–4306. <https://media.neliti.com/media/publications/470157-none-772b126d.pdf>

Widyana, M. R. (2024). *Strategi Partai Gelora sebagai Partai Baru Menuju Pemilu 2024 untuk Memenuhi Parliamentary Threshold*. 4(1), 125–168. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3861>

Yesidora, A. (2023). Redup Pamor Partai Islam di Pemilu 2024. *Katadata.Co.Id*. <https://katadata.co.id/indepth/telaah/646f22279c104/redup-pamor-partai-islam-di-pemilu-2024>

Ziaulhaq, W. (2019). Komunikasi Politik Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Kabupaten Langkat. *AL-BALAGH: Jurnal Komunikasi ...*, 3(1), 1–110.